

Wajah Faksionalisasi Ditubuh Partai Demokrat

Firdaus Ali Firmasnyah*

Abstrak

Faksionalisasi di tubuh partai politik merupakan sebuah hal yang biasa dan hampir terjadi disemua partai yang ada di Indonesia, baik dari tingkat kepengurusan pusat hingga tingkat daerah. Seperti halnya yang sedang dialami oleh partai pemenang pemilu yaitu Partai Demokrat. Faksionalisasi di Partai Demokrat ini sudah muncul ketika diadakannya Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dimenangkan oleh kubu Anas Urbaningrum, dimana kemenangan ini diperoleh setelah mengalahkan dua kompetitornya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali. Faksionalisasi di PD semakin menguat setelah terkuaknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi PD. Secara teoritis pola faksionalisasi di PD ini karena adanya pola patron-klien berdasarkan karismatik tokoh yang dibarengi dengan basis-basis kekuatan sosial. Dampak utama dari adanya faksionalisasi ini adalah terjadinya pelemahan konsolidasi dan solidaritas antar kader-kader PD sehingga berkonsekuensi melemahkan organisasi internal partai dan elektabilitas partai di mata masyarakat.

Kata Kunci: Faksionalisasi dan Partai Demokrat

Abstrak

Factions within political parties are commonly found accross political parties in Indonesia not only at the national but also at regional level. It was happened to Democrat Party which first appeared at the Congress Party to elect the Party leader, which later won by Anas Urbaningrum after defeated both of his competitors, which are Andi Mallarangeng and Marzuki Ali. This factionalization were getting stronger after corruption scandals which involved the party elites. Theoritically the pattern of factionalization were created based on patron-client relationship built on charismatic socially powerful figures. The main impact of this growing factions are the weakening of party solidarity among members of the party and eventually the electability of the party among voters.

Keywords: Functionalization, Democrat Party

***Korespondensi:**

Indikator Politik Indonesia, Jalan Cisdane No.8, Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1033
Email: firdaus.ali.firman@gmail.com

Pengantar

"Kita beruntung memiliki figur Pak SBY sebagai pemersatu dari faksi-faksi. Oleh karena itu sistem di partai perlu diperkuat. Jangan sampai setelah Pak SBY tiada kita kehilangan perekat".

Hayono Isman (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat).

Faksionalisasi atau faksi-faksi dalam tubuh internal sebuah partai politik sudah menjadi sesuatu yang bersifat normatif terutama pada dipartai-partai besar, misalnya Partai Golkar, PDIP, PAN, PKS dan PPP. Namun dari partai-partai tersebut yang paling banyak dikaji oleh para akademisi adalah faksionalisasi yang terjadi pada Partai Golkar. Kemudian bagaimana dengan Partai Demokrat?

Kutipan di atas juga penguat adanya faksi sekaligus pematang argumen beberapa kader PD yang menyatakan bahwa dalam PD tidak ada faksi-faksi dan semua kader PD solid dan kompak. Pernyataan seperti ini paling sering dilontarkan oleh Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat serta sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Penguatan adanya faksi-faksi pada PD, berawal ketika diadakannya Kongres II Partai Demokrat² serta terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa kader PD, misalnya Nazaruddin, Angelino Sondakh dan Anas Urbaningrum meskipun masih dalam status terdakwa. Kongres II PD sudah nampak bahwa terdapat tiga faksi dalam tubuh PD, yaitu Faksi Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng dan Marzuki Ali.

Tulisan ini menggunakan teori Faksionalisasi sebagai pisau analisa yang akan menjadi dasar penjabaran mengenai pemaknaan, tujuan dan dampak dari faksionalisasi pada partai politik khususnya pada PD. Serta penggunaan beberapa teori terkait dengan faksionalisasi, seperti teori elit, kelompok dan persaingan politik. Dengan menggabungkan teori, gagasan dan kasus dalam satu bagian yaitu konstruksi gagasan dengan tujuan untuk menemukan sebuah pemahaman baru mengenai faksionalisasi partai politik.

Faksionalisasi dalam Perspektif Teori

Menurut Huntington seperti yang dikutip M. Ali Safa^{at} bahwa faksionalisasi atau pengelompokan merupakan salah satu tahap perkembangan partai politik (Safa^{at}, 2009). Lebih

lanjut Huntington menjelaskan bahwa faksionalisasi adalah pengelompokan yang biasanya terjadi di antara anggota perwakilan namun belum terbentuk sebagai organisasi resmi. Pada fase ini partisipasi maupun kelembagaan politik masih rendah.

Individu-individu dan kelompok-kelompok politik masih memiliki perilaku politik tradisional yang belum terorganisasi secara modern. Kehidupan politik hanya melibatkan sedikit orang yang bersaing satu sama lain dalam kelompok yang tidak terstruktur sehingga daya tahannya kecil dan merupakan wahana penonjolan pribadi-pribadi tertentu. Semua aliansi atau kaukus yang terbentuk dapat saja disebut partai, tetapi tidak memiliki dukungan sosial dan organisasional yang berkesinambungan.

Tafsir M. Ali Safa^{at} mengenai pemaknaan faksionalisasi menurut Huntington, bahwa penekanan pemaknaan faksionalisasi adalah pengelompokan anggota parlemen pada parlemen yang dibentuk untuk memenuhi demokrasi perwakilan (Safa^{at}, 2009). Ada hal yang menarik dari Tafsir M. Ali Safa^{at} bahwa faksionalisasi disebut sebagai pengelompokan pra-partai karena pada saat itu organisasi partai politik sebagai lembaga formal belum dikenal hingga tahun 1830-an (Safa^{at}, 2009). Deskripsi faksionalisasi menurut Huntington sama halnya dengan penjabaran Menurut Sartori seperti yang dikutip Sigit Pamungkas, bahwa secara epistemologis dan sematis, “faksi (*faction*)” dan “partai (*party*)” tidak mengacu kepada makna yang sama.

Faksi, yang merupakan istilah yang jauh lebih tua dan lebih mapan, berasal dari verba latin *facere* (melakukan, bertindak), dan *factio* untuk mengacu kepada kelompok politik yang menyimpang kepada suatu *facere* yang memecah dan berbahaya, kepada “tindakan yang gawat.” Jadi makna pertama yang dibawa oleh akar latin adalah gagasan tentang kesombongan yang keterlaluan, perilaku yang berlebihan, tanpa perasaan, dan berbahaya (Pamungkas, 2011).

Dapat disimpulkan pemaknaan faksionalisasi menurut Huntington dan Sartori bahwa faksionalisasi atau faksi merupakan pengelompokan sejumlah elit baik individu maupun berkelompok pada sebuah organisasi yang bukan merupakan organisasi formal partai politik. Dengan kata lain kelahiran faksionalisasi atau faksi lebih dulu jika dibandingkan dengan terbentuknya partai politik.

Sedangkan pengertian faksionalisasi menurut Belloni (1978) seperti yang dikutip Burhanuddin Muhtadi (2011), membagi tipologi faksionalisasi partai ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Pertama, faksi yang terbentuk atas dasar kesamaan cara pandang dalam merespons isu politik. Biasanya tak berusia panjang, sangat insidental, dan informal.

- Kedua, faksi yang terbentuk karena pola patron-klien. Jenis ini dipengaruhi oleh faktor karisma tokoh yang memiliki basis sosial yang jelas.
- Ketiga, jenis faksi yang paling formal dan terorganisasi. Eksistensi faksi ini diakui AD/ART partai (Burhanuddin, 2012).

Pengertian faksionalisasi yang dikemukakan Belloni lebih kontemporer jika dibandingkan dengan faksionalisasi yang diungkapkan Huntington maupun Sartori yang lebih klasik pemaknaannya. Hal ini dibedakan atas dasar masa terbentuknya faksionalisasi itu sendiri. Jika Belloni menjelaskan bahwa faksionalisasi merupakan salah satu bagian dari partai politik sedangkan Huntington dan Sartori menyatakan bahwa faksi berbeda dengan partai politik dan secara fase terbentuknya, faksionalisasi atau faksi lebih dahulu terbentuk dari pada partai politik.

Hasil penelitian dan tulisan (Misrina, 2010) yang berjudul “Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada Pilkada 2007”, dapat dijadikan rujukan untuk mendapatkan penjabaran teori faksionalisasi yang lebih mengerucut dan fokus. (Misrina, 2010) memfokuskan teori faksionalisasi menjadi dua unsur yaitu: a). Kepentingan Politik Elit Partai; dan b) Budaya Klientisme: Patron-klien. Pada unsur Budaya Klientisme: Patron-klien dibagi menjadi dua: yaitu (a) *Cligues and Tendencies*, faksi merupakan kelompok kecil yang berada di dalam partai politik dan memperlihatkan tingkat organisasi yang minim; dan (b) *Personel, client-group faction*, faksi yang dibuat menurut selera dan kepentingan berdasarkan klientalisme (Misrina, 2010).

Tiga Faksionalisasi dalam Partai Demokrat

Fokus pembahasan pada sub-judul ini adalah pemetaan kepentingan dan perebutan kekuasaan tiga faksi besar dalam tubuh partai internal PD, yaitu Ketua Umum Anas Urbaningrum, Kemenpora Andi Mallarangeng dan Ketua DPR-RI Marzuki Ali baik pada saat Kongres II PD maupun setelah kongres. Seperi yang sudah jelaskan pada bagian awal, bahwa kasus korupsi yang melanda Nazarudin semakin menguatkan dan meruncingkan argumen bahwa faksionalisasi pada PD memang terus eksis dan berkembang.

- ***Wajah Pertama: Ketua Umum Anas Urbaningrum***

Dengan terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD pada Kongres II dengan mengalahkan dua kompetitornya yaitu Andi Malarangeng dan Marzuki Ali masih menyisahkan sebuah atmosfir politik yaitu terpetakannya dan menguatnya faksionalisasi pada PD. Kemenangan Anas Urbaningrum tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari kelompok-kelompok yang mendukung faksi Anas Urbaningrum.

Yon Machmudi dengan artikelnya yang berjudul “Faksi-faksi Dalam Partai Demokrat Pasca Kongres”, menyebutkan bahwa kemenangan Anas tidak lepas dari keahlian Anas dalam menghimpun dukungannya, seperti diketahui bahwa Anas merupakan gerbong HMI dan mantan aktifis 1998. Pengalaman Anas dalam PB HMI memberi legitimasi bahwa Faksi yang dibentuk oleh Anas merupakan faksi yang kuat mengingat ada beberapa kelompok yang mendukung penguatan faksi Anas. Kelompok ini antara lain digolongkan pada tiga kelompok yaitu:

Tabel 1: Daftar Pendukung Faksi Anas Urbaningrum

Individu/Kelompok 1: Petinggi Partai Demokrat	Individu/Kelompok 2: Diluar Kepengurusan PD	Individu/Kelompok 3: Tingkat <i>Grassroot</i>
M. Nazzarudin	Ulil Abshar dan Chatibul Umam Wiranu (Kader PD dari kalangan muda NU)	Anas menguasai sedikitnya 256 DPC atau sekitar 85% DPC yang berada di belakang Anas.
Sultan Batugana	Ferry Juliantono (Ketua Dewan Tani)	Dari DPD yang ada diseluruh daerah, hanya dua DPD yang dianggap mbalelo (Trinanda, 2012)
Andi Nurpati	Bambang Wirayoso (Ketum Seriakt Pekerja Nasional)	
	Karel (Sekum SPN)	
	Teddy Wibisono	
	Poltak Ike Wibowo	
	Himawan Japra	
	Taufiq Riyadi	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

- **Wajah Kedua: Andi Malarangeng**

Faksi Andi Malarangeng dapat dikatakan sebagai faksi yang paling kontras dengan faksi Anas Urbaningrum. Persaingan Andi dengan Anas tidak hanya pada saat Kongres II Pemilihan Ketua Umum PD, persaingan kedua faksi ini terus berlanjut dan menunjukkan penguatan bahwa dalam tubuh PD memang ada faksi-faksi.

Resistensi dan kontradiksi yang ditunjukkan oleh faksi Andi pada faksi Anas muncul kepermukaan ketika M. Nazaruddin sebagai pendukung Anas Urbaningrum

menjadi tersangka kasus korupsi Wisma Atlet yang juga menyeret Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum.

Dengan adanya kasus ini, kubu Andi terus menyerang faksi Anas dengan tuntutan pemberhentian Anas sebagai Ketua Umum dan melakukan penyidikan lebih cepat terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Anas. Seperti yang dikabarkan di media massa bahwa tarik-menarik kepentingan antara faksi Andi dengan Anas sangat terlihat jelas. Ini terlihat ketika faksi Andi berusaha keras agar Partai Demokrat memberikan sanksi organisasi yang maksimal terhadap Nazarudin. Sedangkan kubu Anas lebih mendorong penyelesaian hukum.

Dalam Kongres II, faksi Andi merupakan faksi yang dekat dengan poros Cikeas, dalam arti SBY memberikan dukungan penuh secara individu terhadap pencalonan Andi Malarangeng sebagai Ketua Umum. Namun dukungan SBY tersebut tidak berpengaruh pada proses pemilihan Ketua Umum yang dilakukan secara demokratis dengan voting. Langkah Andi Malarangeng harus berhenti sebagai calon Ketua Umum setelah suara yang dia dapatkan di bawah suara Anas Urbaningrum dan Marzuki Ali.

Meskipun Andi Malarangeng mendapatkan dukungan dari Cikeas dan beberapa elit Partai Demokrat, namun Andi Malarangeng tidak mempunyai cukup dukungan di tingkat *grassroot* yaitu pada level DPC dan DPD. Di bawah ini beberapa elit Partai Demokrat yang mendukung Andi Malarangeng:

Tabel 2: Daftar Nama Pendukung Faksi Andi Malarangeng

Individu/Kelompok 1: Individu/Kelompok Petinggi Demokrat	Individu/Kelompok 2: Tingkat <i>Grassroot</i>
Edi Baskoro	Hanya ada 82 DPC dan DPD yang mendukung Andi Malarangeng
Ramadhan Pohan	Di Jawa Tengah Andi Malarangeng hanya didukung 11 cabang dari 35 pengurus cabang yang ada
Dani Sriyanto	Namun beberapa sumber mengayatakan bahwa dari Jawa Tengah terdapat 27 cabang yang siap mendukung Andi Malarangeng
Amir Syamsuddin	
Deni Kailimang	
Kastorius Sinaga	
Andi Nurpati	
Radityo Gambiro	
Munawar Fuad Noeh	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

- **Wajah Ketiga: Ketua DPR Marzuki Ali**

Seperti yang dilansir (*antaranews.com*, 2010) bahwa dalam konteslasi perebutan kekuasaan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Marzuki Ali dijuluki sebagai “Kuda Hitam”. Status “kuda hitam” diberikan karena Marzuki Aliie mendapatkan perolehan suara di luar perkiraan banyak pihak. Perolehan suara Marzuki Aliie yang jauh mengalahkan perolehan suara Andi Malarangeng yang merupakan calon ketua umum yang diunggulkan. Dengan perolehan suara sebesar 209 suara atau 40%, Marzuki Aliie menggeser satu kompetitornya untuk maju ke putaran kedua yaitu Andi Malarangeng yang hanya mendapatkan 82 suara atau 16%. Di bawah ini tabel yang akan menggambarkan dukungan terhadap faksi Marzukie Aliie.

Tabel 3: Daftar Nama Pendukung Faksi Marzukie Aliie

Individu/Kelompok 1: Petinggi Partai Demokrat	Individu/Kelompok 2: Tingkat Grassroot
Achsanul Qosas	Secara Nasional faksi Marzuki Aliie mendapatkan dukungan dari 387 DPD dan DPC di seluruh Indonesia dalam Kongres II.
Reza Aliie	
Max Supacua	Sedangkan di tingkat lokal. DPD Partai Demokrat Aceh dimana 22 DPC mendukung Marzuki Aliie. Marzukie Aliie juga melakukan konsolidasi dengan 72 DPD dan DPC se Sulawesi dan Maluku.
Peralihan suara dari faksi Andi Malarangeng terhadap faksi Marzuki Aliie setelah kubu Andi Malarangeng kalah dan tidak dapat melanjutkan ke putaran dua pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

.Dampak Logis Adanya Faksionalisasi

Penjabaran studi kasus yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai perebutan kekuasaan secara internal oleh faksi-faksi pada PD yang diwakili kubu Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng dan Marzuki Ali sudah cukup memberikan pelajaran yang dapat dijadikan sebuah hasil kajian teoritis mengenai dampak logis dari adanya faksionalisasi. Dampak logis dari adanya faksionalisasi ini lebih mengarah pada implikasi negatif terhadap lembaga internal partai politik itu sendiri. Implikasi negatif ini adalah:

- ***Lemahnya Organisasi Internal Partai Politik***

Faksionalisasi yang terlalu tajam dan ekstrim pada tubuh parpol secara tidak langsung menciptakan kelemahan kerorganisasian partai politik. Hal ini dikarenakan tarik-menarik kepentingan masing-masing dari parpol sehingga melupakan fungsi-fungsi utama dari parpol. Faksi-faksi lebih fokus pada perebutan kekuasaan secara internal daripada menguatkan organisasi internal dan penguatan kader sehingga hal ini berdampak pada buruknya atau terhentinya berbagai program partai politik itu sendiri.

Lemahnya organisasi internal partai politik ini akan berimplikasi langsung pada:

- Pelemahan integritas anggota/kader parpol;
- *Power Sharing* sebagai tuntutan utama; dan
- Lemahnya konsolidasi dan konsensus anggota parpol.

Hal ini sudah dialami oleh PD. Dengan adanya faksionalisasi, terjadi pelemahan organisasi internal parpol terutama pada integritas anggota. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh kader PD seperti Nazarudin dan Angelina Sondak menunjukkan tidak adanya integritas yang kuat di PD, ini nampak ketika faksi Andi Malarangeng yang terus menyerang Nazarudin agar menyerahkan diri dan segera diperiksa mengenai kasus korupsi yang dilakukannya.

- ***Bunuh Diri: Pelemahan Citra Parpol dan Elektabilitas***

Dengan mempertontonkan perdebatan-perdebatan yang kontradiktif dan resistence pada masing-masing faksi, secara tidak langsung hal tersebut menciptakan sendiri pelemahan citra parpol PD oleh kader PD sendiri. Hal ini sependapat dengan ungkapan Burhanuddin Muhtadi bahwa:

“Faksionalisasi internal PD tidaklah diciptakan oleh media atau pengamat, tapi justru dipertontonkan oleh mereka sendiri secara telanjang. Tiap kubu mempertontonkan noise (kegaduhan) ketimbang voice yang substantif dan terukur. Seharusnya sekeras apa pun perbedaan internal partai, suara partai harus tetap ”satu” ketika bicara di depan publik.” (Burhanuddin, 2012).

Penulis juga menyebut ini sebagai tindakan “bunuh diri” karena dengan menunjukkan disintegrasi baik dari segi gagasan maupun tindakan serta apa yang disebut oleh Burhanuddin Muhtadi menonjolkan noise (kegaduhan) pada internal partai akan menempatkan partai politik sebagai umpan yang siap dimangsa oleh media massa. Media massa dengan cepat akan menyebarkan disintegrasi dan kegaduhan terhadap masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada penurunan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat pada partai tersebut. Ketidakpercayaan inilah yang menjadi ancaman pengurangan secara tidak langsung “mesing pendulang suara (*voter*)” bahkan ancaman

yang paling ditakutkan adalah mundurnya kader-kader partai tersebut di tingkat paling bawah (grassroot).

- ***Menguatnya Signifikansi Persaingan Politik Secara Internal***

Firmanzah dalam bukunya *Mengelola Partai Politik* menjelaskan bahwa persaingan politik adalah “kodrat-alamiah” yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Karena pemenangnya hanya satu individu atau kelompok sangat wajar bila masing-masing pihak berlomba-lomba untuk menjadi juara (Firmanzah, 2011). Lebih lanjut Firmanzah menjelaskan bahwa perjuangan politik terjadi pada non-pemilu, pihak yang menang adalah pihak yang berhasil mendapatkan basis dukungan terbesar untuk mendukung perjuangan politiknya (Firmanzah, 2011). Signifikansi persaingan politik internal dianggap implikasi negatif dikarenakan:

- Dapat menimbulkan transaksi *money politics* pada internal partai;
- Lemahnya solidaritas;
- Ancaman disintegrasi; dan
- Pendelegitimasi Salah Satu Elit Faksi.

Urian mengenai implikasi negatif dari adanya faksionalisasi dalam tubuh parpol senyatanya dapat dilihat dan sedang dialami oleh Partai Demokrat. Tarik-menarik kepentingan, saling serang antara faksi satu dengan faksi yang lain dan tindakan cuci tangan pada PD menunjukkan sebuah kegagalan konsolidasi dan konsensus dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Hal inilah yang juga menciptakan kekeruhan pada tubuh PD.

Catatan Akhir: Pengelolaan Faksionalisasi Partai Politik

Terjadinya sebuah faksionalisasi pada partai politik memang tidak bisa dihindari. Ini disebabkan karena partai politik merupakan sebuah organisasi formal yang di dalamnya terhimpun beberapa individu atau kelompok yang selalu bersaing secara internal untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan selalu ingin mencapai kekuasaan tertinggi.

Maka dari itu faksionalisasi pada parpol memerlukan pengelolaan yang baik dengan tujuan untuk mengkonduksifkan faksi-faksi dan memperkuat organisasi internal partai politik. Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat solidaritas, konsolidasi dan konsensus internal partai. Dengan demikian partai politik akan tetap terlihat kuat dan solid jika dipandang dari luar yang akan menyukseskan dan memperkuat partai tersebut di masa mendatang.

Merujuk pada pendapat Larry Diamond dan Richard Gunther dalam bukunya *Political Parties and Democracy* (2001). Larry Diamond dan Richard Gunther menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menguatkan dan menumbuhkan keutuhan internal partai; *pertama*, mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh partai. *Kedua*, Meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal partai. Dan *ketiga*, memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian***.

Daftar Pustaka

- „Tewasnya“ Politik Pencitraan di Kongres II Demokrat”, diunduh dari www.antaranews.com pada tanggal 13 Oktober 2012.
- “Ada 5 Kelompok Dalam Partai Demokrat: Bukan hanya faksi Andi Malarangeng dan Marzuki Ali”, diakses dari www.viva.co.id pada tanggal 14 Oktober 2012.
- Andi Trinanda, “Agenda Pelengseran Anas: Kekuatan Akar Rumput Versus Kekuatan Elit-Cikeas”, diunduh melalui www.kompasiana.com pada tanggal 13 Oktober 2012.
- Burhanuddin Muhtadi, “Faksionalisasi Demokrat”, diunduh melalui www.seputar-indonesia.com pada tanggal 14 Oktober 2012.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: YOI.
- Misrina, “Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar Di Maluku Utara Pada Pilkada 2007”, dalam *Jurnal Studi Pemerintahan* Vo. 1 No. 1 Agustus 2010.
- Muchamad Ali Safa‘at. (2009). *Pembubaran Partai Politik dalam Bingkai Negara Hukum dan Demokrasi*. Disertasi FH UI.
- Pamungkas, Sigit. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: IDW.